

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 19
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan;
1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian;
3. Deputi II (Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis) Kementerian Koordinator Perekonomian;
4. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*; dan
5. Ketua Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 5 Oktober 2020
Waktu : 10.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Acara : Membahas:
1. Pengelolaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi; dan
2. Lain-lain.
Ketua Rapat : Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG),
dilanjutkan oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 42 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
2. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);
3. Ir. Musdhalifah Machmud, M.T. (Deputi II/Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian);

4. Achmad Bakir Pasaman Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company* serta jajaran Direksi anak perusahaan;
5. Supari (Direktur Mikro BRI/HIMBARA);
6. Sis Apik Wijayanto (Direktur Hubungan Kelembagaan BNI/HIMBARA);
7. Muhammad Iqbal (Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM BNI/HIMBARA); dan
8. Donsuwan Simatupang (Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri/HIMBARA).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Deputy II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*, dan Ketua HIMBARA, membahas Pengelolaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Lain-lain, dibuka pukul 10.15 WIB oleh Ketua Rapat Dedi Mulyadi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah mengenai alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi, yaitu:
 - a. Subsidi langsung, dengan mekanisme langsung masuk ke rekening petani.
 - b. Subsidi harga, dengan mekanisme pemberian subsidi di hilir guna menjaga harga agar menguntungkan petani.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan kajian terhadap kedua usulan alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, untuk mencari solusi pola subsidi yang paling efektif dan efisien serta menjamin subsidi yang diterima petani tepat guna dan tepat sasaran.

2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menghitung ulang kebutuhan dan komposisi pupuk bersubsidi mengingat jumlah pupuk bersubsidi selalu meningkat, tidak sebanding dengan luas areal pertanaman yang menurun dan indeks pertanaman yang rendah.
3. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, antara lain terkait perbaikan data spasial lahan, data luas lahan, serta validasi data jumlah petani yang berhak menerima bantuan pupuk bersubsidi, sebagai acuan

penentuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan komposisi pemberian pupuk bersubsidi.

4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar meningkatkan efektivitas pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang kinerja serta keanggotaan Tim Pengawas Pupuk di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten sehingga alokasi penggunaannya tepat sasaran.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang pola dan melakukan penyempurnaan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani yang berlaku saat ini dengan mempertimbangkan kendala-kendala teknis di lapangan, sehingga pupuk bersubsidi dapat disalurkan dengan baik dan diterima oleh seluruh petani penerima dengan mudah.
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar dalam menjalankan program Kartu Tani memprioritaskan daerah yang sudah memiliki sarana teknologi memadai dan tetap menyalurkan pupuk bersubsidi secara manual di daerah yang belum cukup memiliki sarana teknologi yang memadai.
7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meninjau ulang pola dan komposisi pemberian pupuk dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan volume penggunaan pupuk yang lebih ramah lingkungan dan tidak merusak hara tanah.
8. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap agen/distributor di daerah. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap agen/distributor yang melakukan pelanggaran.
9. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan kurang bayar pupuk bersubsidi kepada PT Pupuk Indonesia sebesar Rp11.198.552.212.487,00 (sebelas triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan rincian:
 - a. Tahun 2017, sebesar Rp45.080.939.470,00 (empat puluh lima miliar delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Tahun 2018, sebesar Rp5.712.863.720.530,00 (lima triliun tujuh ratus dua belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah); dan

- c. Tahun 2019, sebesar Rp5.440.607.552.487,00 (lima triliun empat ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151

Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Suwandi, M.Si.

Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian Kementerian
Pertanian,

Ttd.

Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M.

Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan
Pertanian Kementerian Koordinator
Perekonomian,

Ttd.

Ir. Musdhalifah Machmud, M.T.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia
 Holding Company,

Ttd.

Achmad Bakir Pasaman

a.n. Ketua HIMBARA
Direktur Bisnis Mikro BRI,

Ttd.

Supari